



## ARAH HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-MALAYSIA DI MASA PEMERINTAHAN JOKOWI

Adirini Pujayanti\*)

### Abstrak

*Presiden Jokowi menjadikan Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan resminya ke sejumlah negara di ASEAN. Indonesia dan Malaysia berupaya menguatkan komitmen untuk meningkatkan kerja sama bilateral di berbagai area yang menjadi fokus bersama kedua negara, mulai dari penyelesaian sengketa perbatasan sampai isu pekerja migran. Kebijakan luar negeri bebas aktif yang bersifat pragmatis yang dilaksanakan Presiden Joko Widodo diharapkan akan memperkuat kepentingan nasional Indonesia.*

### Pendahuluan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato pengukuhan di sidang paripurna MPR menegaskan akan tetap menganut politik luar negeri bebas aktif. Indonesia adalah negara besar di Asia Tenggara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, di bawah kepemimpinannya, Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan terus aktif dalam setiap forum internasional. Politik luar negeri bebas aktif tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional, menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kebijakan luar negeri Presiden Jokowi diutamakan untuk kepentingan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Prinsip bebas aktif yang selama

ini dianut tidak ditinggalkan karena Indonesia tetap membuka diri bagi semua negara. Namun demikian, Presiden Jokowi menekankan kemitraan yang erat akan dilakukan terhadap negara yang dinilai akan memberi banyak manfaat bagi kepentingan nasional. Dengan demikian, kebijakan bebas aktif Presiden Jokowi dianggap bersifat pragmatis.

Menurut Hikmahanto Juwana dalam tafsir baru yang dapat disebut sebagai Doktrin Jokowi (*Jokowi's Doctrine*) tersebut, politik luar negeri RI yang 'Bebas Aktif' dapat ditafsirkan sebagai '*All Nations are Friends until Indonesia's sovereignty is degraded and national interest is jeopardized*'. Hal tersebut tersirat bahwa sejak awal masyarakat internasional mengetahui bahwa Indonesia tidak akan

\*) Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional, pada Bidang Hubungan Internasional Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: adirini.pujayanti@dpr.go.id



bisa diajak berkompromi ketika kedaulatan dan kepentingan nasionalnya dilanggar oleh negara lain atau dirugikan. Tafsir kebijakan luar negeri baru ini diharapkan akan membuat Indonesia disegani oleh masyarakat internasional dan mendapat dukungan publik di dalam negeri.

Diplomasi dan politik luar negeri Indonesia harus dapat memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri. Langkah lanjut dalam memastikan kebijakan luar negeri searah dengan kebijakan Presiden Jokowi, Kementerian Luar Negeri telah menetapkan 3 (tiga) isu prioritas dalam hubungan luar negeri, yaitu: (i) isu kedaulatan; (ii) diplomasi ekonomi, dan (iii) perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

### Malaysia Sebagai Mitra Penting

Dengan tafsir baru terhadap politik luar negeri bebas aktif tersebut, Presiden Jokowi memulai lawatan resmi pertamanya ke negara-negara Asia Tenggara. Kunjungan ke negara-negara ASEAN merupakan tradisi yang biasanya dilakukan kepala negara ASEAN yang baru menjabat. Lawatan resmi tersebut mencerminkan bahwa hubungan Indonesia dengan negara tetangga merupakan salah satu prioritas bagi pemerintahan Jokowi. Dengan memilih Malaysia sebagai negara pertama yang dikunjungi menunjukkan Malaysia adalah negara penting bagi Indonesia. Secara geografis, kedua negara tidak bisa tidak harus memiliki hubungan erat karena memiliki banyak isu untuk dibahas bersama. Beberapa isu penting tersebut ialah perlindungan buruh migran Indonesia (BMI), perbatasan, dan kerja sama ekonomi dan investasi.

Menteri luar negeri kedua negara sebelumnya telah bertemu di Kota Kinabalu pada tanggal 26 Januari 2015 lalu. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat komitmen pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang. Pada kesempatan itu juga disepakati bahwa kedua pihak akan mendorong semua instansi terkait untuk menyelesaikan semua masalah yang tertunda.

### Isu Bilateral Penting

#### 1. Buruh Migran Indonesia (BMI)

Isu perlindungan buruh migran Indonesia (BMI) merupakan hal yang terpenting bagi Indonesia, karena mayoritas BMI ada di negara tetangga tersebut, legal maupun ilegal. Namun demikian, di sisi lain, tingginya kebutuhan Malaysia akan BMI belum diimbangi dengan penghargaan yang sepadan. Masih banyaknya perlakuan negatif yang diterima BMI sampai yang baru-baru ini terjadi terkait pemasangan iklan yang dianggap merendahkan martabat Indonesia.

Menurut LSM Migrant Care persoalan-persoalan mendesak yang harus segera diselesaikan adalah:

- a. Keseriusan pemerintah Malaysia dalam memberikan perlindungan dan memastikan pemenuhan hak-hak PRT migran Indonesia dengan standar hak asasi manusia;
- b. Desakan agar pemerintah Malaysia tidak menggunakan standar ganda dan mengakhiri praktek kriminalisasi dalam penanganan buruh migran tak berdokumen. Selama ini industri perkebunan yang memakmurkan ekonomi Malaysia ditopang jutaan buruh migran tak berdokumen;
- c. Desakan kepada pemerintah Malaysia untuk memberikan akses kepada puluhan ribu anak-anak buruh migran Indonesia tak berdokumen untuk layanan pendidikan dan kesehatan;
- d. Desakan kepada pemerintah Malaysia (sebagai Ketua ASEAN) untuk serius menuntaskan pembahasan dan perwujudan adanya instrumen dan mekanisme perlindungan hak asasi buruh migran di kawasan ASEAN yang efektif dan bersendikan pada instrumen internasional perburuhan dan hak asasi manusia.

Presiden Jokowi menjadikan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai salah satu prioritas politik luar negeri. Langkah Presiden Jokowi memprioritaskan negara Malaysia patut diapresiasi karena pelayanan dan perlindungan WNI dan BMI di Malaysia memang menjadi tantangan yang besar. Diperkirakan terdapat sekitar 2,5 juta warga Indonesia berada di Malaysia, di mana hampir setengahnya berstatus ilegal.

Pemerintah mengapresiasi program 6P Pemerintah Malaysia, sebuah program amnesti untuk TKI yang masuk ke Malaysia tidak melalui jalur resmi. Lebih dari dua ratus sepuluh ribu pekerja migran yang tidak terdokumentasi sudah masuk ke dalam program ini selama kurun waktu 2011-2014. Indonesia akan terus mendiskusikan dengan Malaysia program penanganan bagi pekerja migran yang belum terdokumentasikan. Pemerintah Indonesia menginginkan adanya kesepahaman dalam hal buruh migran diantara negara-negara ASEAN.

Persoalan BMI di Malaysia terjadi akibat keberangkatan secara illegal sehingga mengalami kesulitan dalam masalah perlindungan. Terjadi kesepakatan bahwa BMI hanya bisa datang dan bekerja di Malaysia melalui saluran perekrutan resmi untuk memastikan keselamatan mereka. Kedua negara berhasil menyepakati *Memorandum of Understanding (MoU)* pengadaan akses pendidikan terhadap anak-anak BMI yang bekerja di Malaysia, khususnya di kawasan perkebunan. Sedangkan, dalam hal iklan yang dianggap melecehkan Indonesia, KBRI di Malaysia telah melayangkan nota protes kepada kementerian luar negeri Malaysia, dan telah mengirimkan *retainer lawyer* untuk menemui pihak swasta terkait untuk mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya.

## **2. Penyelesaian Masalah Perbatasan**

Presiden Jokowi melakukan suatu pendekatan yang proaktif dalam masalah perbatasan dengan menjadikan Malaysia sebagai negara pertama memulai lawatan resminya. Dalam isu perbatasan, kedua negara menyetujui pentingnya mengintensifkan negosiasi dalam masalah perbatasan darat dan maritim. Sebagai tindak lanjut, perundingan perbatasan maritim akan dimulai di minggu kedua di bulan Februari 2015. Indonesia dan Malaysia juga akan mulai mendiskusikan *roadmap* untuk perundingan lebih lanjut.

Kedua negara akan membangun sebuah mekanisme baru untuk menyelesaikan masalah teritorial perbatasan. Upaya tersebut diperlukan karena proses perundingan yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak mengalami kemajuan yang signifikan.

Setiap pihak akan menunjuk utusan khusus yang bertugas memimpin pembicaraan peninjauan dan menemukan formula yang dapat diterima oleh pemerintah dan masyarakat kedua negara.

Saat ini diketahui terdapat sembilan titik perbatasan darat antara wilayah Indonesia dan Malaysia belum terselesaikan, terutama di sepanjang perbatasan darat antara Kalimantan dan negara bagian Sabah dan Serawak. Terdapat pula perselisihan di laut setelah Malaysia membangun tiang pancang di Tanjung Datu, Kalimantan Barat, yang merupakan wilayah abu-abu. Persoalan-persoalan ini masuk ke dalam agenda pembicaraan Presiden Jokowi. Penyelesaian perbatasan yang masih dipersengketakan antara Malaysia dan Indonesia sampai dengan saat ini masih sulit mengalami kemajuan.

## **3. Perdagangan dan Investasi**

Indonesia merencanakan adanya peningkatan nilai neraca perdagangan kedua negara menjadi 30 juta dollar AS tahun 2015. Malaysia adalah salah satu negara mitra dagang terbesar dan investor asing terbesar kelima di Indonesia. Nilai investasi Malaysia mencapai 711 juta dolar AS pada 2014, dan tren itu diperkirakan akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang. Pemerintah Malaysia berjanji akan memberikan kemudahan kepada perbankan Indonesia dan menerapkan resiprokal perbankan yang selama ini tidak berjalan.

Di lain pihak, Malaysia berkeinginan kedua negara bekerja sama memproduksi mobil ASEAN. Kedua kepala pemerintahan menyaksikan penandatanganan MoU antara pihak swasta Proton dengan PT Adi Perkasa Citra Lestari. MoU ini merupakan inisiatif bisnis antara Pemerintah Malaysia dan swasta Indonesia. Pemerintahan Presiden Jokowi menyambut masuknya investasi ini sebagai penggerak perekonomian negara dengan perkiraan penyerapan 6000 tenaga kerja dan proses transfer teknologi. Malaysia meminta dukungan Indonesia untuk menjadikan Proton mobil resmi ASEAN, namun Indonesia belum mendukungnya. Kehadiran Presiden Jokowi dalam penandatanganan MoU tersebut menimbulkan polemik karena memberi kesan adanya dukungan pemerintah. Dalam persaingan otomotif tidak mudah bagi

perusahaan baru yang ingin membuat pabrik di Indonesia. Proyek tersebut menghadapi tantangan cukup berat, terutama di sektor pendanaan. Diperkirakan pembangunan sarana, SDM dan teknologi penunjang untuk proyek tersebut membutuhkan dana hingga Rp70 triliun. Perumusan kebijakan yang mendukung industri mobil ASEAN juga memerlukan waktu sangat panjang.

Presiden Jokowi lebih diharapkan membahas peningkatan investasi, terutama di bidang pengolahan hasil perikanan dan sawit. Investasi bidang sejalan dengan kebijakan pro maritim Indonesia dan tidak akan mengganggu pengusaha lokal karena kerja sama dengan industri Malaysia lebih berorientasi ekspor. Di bidang pariwisata, pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan Malaysia ke Indonesia.

## Penutup

Kunjungan Presiden Jokowi ke Malaysia dalam rangkaian lawatan resminya ke sejumlah negara di kawasan ASEAN memiliki nilai strategis sehubungan dengan dinamisnya hubungan diplomatik kedua negara. Selain itu, kunjungan ini juga merupakan hal yang mendesak mengingat pada tahun 2015 ini, Malaysia merupakan Ketua ASEAN dan arti pentingnya kawasan ASEAN dalam politik luar negeri Indonesia di bawah Presiden Jokowi.

DPR dapat mengawasi pelaksanaan kerja sama kedua negara selanjutnya agar tetap sesuai dengan prioritas kepentingan nasional. Dalam hal kerja sama yang dinilai tidak dibutuhkan secara mendesak oleh masyarakat, seperti mobil nasional, DPR dapat meminta pemerintah untuk menundanya. Kerja sama otomotif antar negara akan lebih berguna bila terkait dengan industri pembuatan alat transportasi massal yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti bis dan kereta api. Pemerintah hendaknya tidak memberikan keistimewaan atau subsidi terhadap kerja sama yang tidak menjadi prioritas kepentingan nasional.

## Referensi

- “Berbicara di Forum Dunia, Jokowi Perlu Sampaikan Doktrin Politik Luar Negeri RI yang Baru”, 10/11/2014, <http://news.detik.com/read/2014/11/10/030958/2743350/10/berbicara-di-forum-dunia-jokowi-perlu-sampaikan-doktrin-politik-luar-negeri-ri-yang-baru>, diakses 5 Februari 2015.
- “Di Hadapan BMI Malaysia, Menlu Retno Tekankan Prioritas Perlindungan WNI”, <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7188&l=id>, diakses 28 Januari 2015
- “Indonesia Anggap Malaysia Mitra Penting”, *Kompas* 6 Februari 2015, h.15
- “Jokowi ke Malaysia, Begini Harapan Tuan Rumah”, *Koran Tempo*, 5 Februari 2015, <http://www.tempo.co/read/news/2015/02/05/118640130/Jokowi-ke-Malaysia-Begini-Harapan-Tuan-Rumah>, diakses 6 Februari 2015
- “Jokowi-Najib Bicarakan Mobil ASEAN”, *Koran Tempo*, 6 Februari 2015, h.5
- “Lawatan ke Malaysia Jadi Pertaruhan Jokowi Soal TKI”, *CNN Indonesia*, Kamis, 05/02/2015, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/2015020503036-20-29744/lawatan-ke-malaysia-jadi-pertaruhan-jokowi-soal-tki/0>, diakses 6 Februari 2015.
- “Malaysia Janji Terapkan Resiprokal Perbankan”, *Media Indonesia*, 9 Februari 2015, h. 17.
- “Menlu RI-Malaysia bertemu di Kinabalu”, *Selasa*, 27 Januari 2015, <http://www.antaranews.com/berita/476586/menlu-ri-malaysia-bertemu-di-kinabalu>, diakses 6 Februari 2015.
- Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia 2015, [http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=433#.VNLYVnuI7\\_c](http://www.indonesiamission-ny.org/zymurgy/custom/statement.php?id=433#.VNLYVnuI7_c), diakses 5 Februari 2015.
- “Politik Luar Negeri Jokowi, Apa Saja Resepnya?”, 16 November 2014, <http://www.tempo.co/read/news/2014/11/16/078622304/Politik-Luar-Negeri-Jokowi-Apa-Saja-Resepnya>, diakses 5 Februari 2015.
- “Studi Kelayakan Proton”, *Kompas*, 8 Februari 2015, h. 15
- “Temui Counterpart Malaysia, Menlu RI Bahas Isu Perbatasan & Sampaikan Aspirasi Pekerja Migran”, <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=7185&l=id>, diakses 27 Januari 2015.